



sebelumnya. *Even* pilkada pada tahun sebelumnya, antusiasme masyarakat Kabupaten Blitar cukup tinggi. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan pilkada kali ini, partisipasi masyarakat sangat rendah, kegiatan seperti kampanye kemudian debat publik tidak dapat dirasakan lagi. Pilkada kali ini dirasakan bermasalah pada persepsi masyarakat mengenai calon yang akan maju dalam pilkada 2015. Selain itu ada juga faktor tarik ulur dalam penetapan batas minimal jumlah calon yang akan maju, membuat dalam proses sosialisai tentang pilkada calon tunggal agak mengalami hambatan terkait dengan *estimasi* waktu yang tinggal sedikit.

Pada pemilihan kepala daerah 2015, memang *euforia* masyarakat tidak begitu terasa. Ada hal yang menarik pada pemilihan Bupati Blitar 2015, ketika *civil society* secara sukarela membuat kegiatan yang berkaitan dengan pilkada. *Civil society* juga mempunyai komitmen untuk mensukseskan pilkada calon tunggal, meskipun respon masyarakat terhadap pilkada terbilang rendah. Pilar penegak *civil society* seperti kelompok organisasi masyarakat (Ormas), berusaha untuk menyadarkan betapa pentingnya pilkada untuk menentukan pemimpin di Kabupaten Blitar.

Keikutsertaan *civil society* dalam pelaksanaan pilkada calon tunggal, merupakan salah satu upaya dari masing-masing organisasi untuk menunjukkan kontribusinya. Selama pilkada yang sudah berlangsung di Kabupaten Blitar, baru kali ini *civil society* dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan politik.

*Civil society* merupakan instrumen untuk mengupayakan nilai-nilai demokratisasi, dengan merealisasikan terbentuknya masyarakat yang mandiri, untuk

menunjukkan posisi masyarakat saat berhadapan dengan negara. Kelompok-kelompok yang menjadi pilar penegak *civil society* seperti, ormas yang bergerak di bidang keagamaan maupun sosial dan budaya, Lembaga Swadaya Masyarakat dan juga media lokal baik TV maupun Radio. Memiliki cara-cara yang berbeda dalam menyikapi atau dalam berpartisipasi pada pilkada di Kabupaten Blitar.

Calon tunggal menjadi fenomena baru didalam proses pemilihan umum, banyak masyarakat pelosok pedesaan masih belum mengetahui tentang mekanisme pilkada dengan satu calon. Masalah ini muncul karena keterbatasan informasi dari pihak penyelenggara pilkada. *Civil society* berperan besar dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan tidak hanya itu, *civil society* juga mampu memberikan motivasi terhadap masyarakat agar mereka dapat menggunakan hak pilihnya.

Dari data yang telah diperoleh, masing-masing kelompok *civil society* mempunyai kesamaan program, programnya yakni turut berperan dalam membuat kegiatan sosialisasi, ada tiga ormas yang mempunyai program tentang penyadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik. Dengan memberikan dasar pengetahuan tentang pentingnya menentukan pemimpin yang akan memimpin mereka dalam lima tahun kedepan. Pilar-pilar *civil society* seperti ormas yang bergerak di bidang keagamaan maupun sosial dan budaya, Lembaga Swadaya Masyarakat dan juga media lokal baik TV maupun Radio, mempunyai cara-cara tersendiri untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pilkada.

Media masa mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang sosialisasi pilkada. Media menjadi saluran yang efektif dan masih dianggap netral. Dengan begitu media dapat menjadi kekuatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, dan juga dorongan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pilkada Kabupaten Blitar 2015. Di kabupaten Blitar ada beberapa media yang terpercaya oleh masyarakat dalam menginformasikan pilkada, Rajawali TV, Radio Persada FM, Radio Mayangkara FM, dan Koran Jawa Pos (Radar Blitar).

Disisi lain, tidak hanya kelompok pro terhadap dilaksanakannya pilkada dengan calon tunggal, yang melakukan kegiatan-kegiatan dalam momentum pilkada 2015. Kelompok kontra yang tidak setuju dengan dilaksanakannya pilkada dengan calon tunggal, juga melakukan tindakan-tindakan melalui penyampaian aspirasinya di kantor KPU Kabupaten Blitar agar untuk disampaikan ke KPU Pusat.

FBM (forum blitar menggugat) merupakan salah satu kelompok masyarakat yang secara terang-terangan menolak diadakannya pilkada dengan calon tunggal. FBM menganggap pilkada dengan mekanisme referendum atau hanya satu pasangan calon telah mencederai nilai-nilai demokrasi. Calon tunggal merupakan representasi matinya kader yang akan menjadi pemimpin di Kabupaten Blitar, terlepas dari sikap pragmatisme parpol. FBM secara tegas menolak pilkada dengan calon tunggal.

Bentuk partisipasi *civil society* yang dilaksanakan oleh berbagai kelompok masyarakat, baik yang pro terhadap pilkada calon tunggal maupun kelompok yang menolak terhadap pilkada calon tunggal, memang mempunyai cara-cara tersendiri

dalam keterlibatan mereka dalam pilkada.

### 1. Pendidikan Politik

Partisipasi politik masyarakat pada pilkada calon tunggal memang tidak terlalu antusias. Kondisi tersebut timbul karena kontestasi dari calon tunggal pada pilkada 2015. Kelompok masyarakat yang pro terhadap pilkada calon tunggal, fenomena ini dijadikan sebuah tantangan dalam melakukan partisipasi ataupun tindakan-tindakan guna untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kabupaten Blitar. Calon tunggal menjadi stigma negatif masyarakat dalam pilkada 2015 di Kabupaten Blitar. Dengan adanya satu calon saja yang maju pada pilkada periode ini, membuat masyarakat menjadi lebih pasif.

*Civil society* memang bergerak bukan Karena ingin memperoleh kekuasaan. Namun *civil society* memberikan ruang bagi masyarakat agar mereka mampu untuk mandiri, sesuai dengan nilai-nilai yang dibawa. Didalam pilkada calon tunggal di Kabupaten Blitar 2015, memang tidak banyak ormas maupun LSM yang bersikap, tentang kontestasi maupun memberikan *statement* mengenai kriteria pemimpin yang akan didukung.

Partisipasi organisasi masyarakat di Kabupaten Blitar, memang tidak menunjukkan adanya dukungan terkait pencalonan calon tunggal dan tidak juga menolak calon tunggal. *Civil society* berusaha untuk memberikan pendidikan politik sebagai tambahan wawasan yang didalamnya berisi

tentang pentingnya menentukan seorang pemimpin. Dari pengamatan peneliti ada tiga ormas yang secara langsung bersikap di pilkada 2015.

Komitmen *Civil society* untuk mensukseskan pilkada 2015 di Kabupaten Blitar. Menjadi sebuah kemajuan tersendiri bagi ormas, karena mereka secara sukarela berpartisipasi pada pilkada tanpa ada calon yang memanfaatkan ormas guna meraih suara dari anggota. Meskipun dari calon tersebut mempunyai suatu keunggulan dan visi/misi yang sesuai dengan tujuan *civil society*. *Civil society* di Kabupaten Blitar tetap berkomitmen untuk bergerak pada proses peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menentukan seorang pemimpin yang dapat mengayomi masyarakat dan memimpin Blitar lima tahun kedepan.

Dengan kemandirian, kesukarelaan dan keswadayaan kelompok, dalam melakukan agenda-agenda yang berkaitan dengan pilkada. *Civil society* berhasil memberikan pemahaman tentang pilkada calon tunggal, program ini bisa dikatakan sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat dan juga anggota dari ormas tersebut khususnya. Tujuan akhir dari partisipasi *civil society* ini adalah demi memperoleh pemimpin yang sesuai dengan keinginan masyarakat.

Kontestasi calon tunggal menjadi fenomena yang menarik, karena keputusan yang disahkan terjadi pada waktu yang terlalu mepet. Meskipun dalam pelaksanaannya terkesan mepet, namun sudah menjadi keputusan dari Mahkamah Konstitusi, dan itu sudah menjadi keputusan atau ketetapan final.

Pandangan *civil society* pada calon tunggal memang ditanggapi dengan beragam, namun yang perlu diperhatikan dari calon tunggal adalah mampu mengayomi dan lebih mengutamakan kepentingan rakyat atau *ummat*. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Bapak Rifai:

“Menurut kami itu sah-sah saja karena keputusan itu sudah disetujui melalui lembaga Mahkamah Konstitusi. Dengan adanya keputusan dari MK tersebut dapat dikatakan adalah keputusan final dan menjadi sebuah pedoman untuk dilaksanakan. Nahdlatul Ulama selaku organisasi non pemerintah dan tidak fokus diranah politik, kami selalu menjadi penggerak masyarakat dan juga sebagai organisasi pemersatu masyarakat terkait kesamaan pedoman dan visi/misi. Sehingga kami dapat menciptakan kemandirian dan mempunyai kekuatan tersendiri. Untuk kriteria calon menurut pribadi saya dan ini tidak terkait dengan NU, siapapun calon yang dipilih harus mempunyai sifat mengayomi masyarakat dan juga dapat memberikan kontribusi yang besar terkait dengan kesejahteraan rakyat. Menurut hemat saya dapat mensejahterakan ummat itu yang paling penting sehingga akan muncul kepercayaan ummat terhadap pemimpin.

Dalam partisipasi *civil society* pada tahun 2015, melibatkan banyak elemen organisasi, seperti organisasi keagamaan, organisasi keprofesian seperti Kelompok Nelayan Kabupaten Blitar dan paguyuban tani. Bentuk partisipasi *civil society* dalam penyelenggaraan pilkada dengan calon tunggal relatif sama.

Meskipun kegiatan dari masing-masing *civil society* relatif sama, namun untuk sasaran yang dituju dalam proses pendidikan politik sangat berbeda. Ormas yang berbasis keagamaan seperti Nahdlatul Ulama, dalam menghadapi pilkada tahun 2015. NU membuat agenda terkait sosialisasi dan

pendidikan politik bagi seluruh anggota yang bekerjasama dengan KPU. Kegiatan ini sebenarnya di tujukan kepada pemilih pemula, yang tergolong pada kelompok IPNU dan IPPNU. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Rifai:

“Bentuk-bentuk kegiatan yang sudah kami jalankan adalah mengenai sosialisasi atau sebagai pendidikan politik masyarakat, terkait pelaksanaan pilkada 2015. Kegiatan-kegiatan tersebut sudah dikordinasikan melalui lembaga banom-banom NU.”<sup>1</sup>

Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang telah terstruktur dan memiliki pengurus di berbagai tingkatan. Kegiatan sosialisasi tersebut dapat dengan mudah diimplementasikan didalam segala lapisan masyarakat ataupun anggotanya. Program sosialisasi NU tersalurkan melalui tingkatan struktur di kecamatan hingga tingkatan yang paling rendah yakni desa atau dusun. Badan otonom NU meliputi:

- a) Muslimat Nahdlatul Ulama, disingkat Muslimat NU, adalah badan otonom yang menghimpun anggota perempuan NU.
- b) Fatayat Nahdlatul Ulama, disingkat fatayat NU, adalah badan otonom yang menghimpun anggota perempuan muda NU.
- c) Gerakan Pemuda Ansor disingkat GP Ansor adalah badan otonom yang menghimpun Anggota Pemuda Nahdlatul Ulama.

---

<sup>1</sup> Rifa'i, *wawancara*, Dirumah bapak Rifa'I Desa Margomulyo, 10 Januari 2017

- d) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama disingkat IPNU adalah badan otonom yang menghimpun pelajar laki-laki, santri laki-laki dan mahasiswa laki- laki.
- e) Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama disingkat IPPNU adalah badan otonom yang menghimpun pelajar perempuan, santri perempuan dan mahasiswi.

Dalam teknis penerapan yang dilakukan oleh NU terkait dengan kegiatan sosialisasi atau memberikan pendidikan politik. Seperti di bawah ini adalah banom NU yang menjadi fokus kelompok sasaran yang paling diutamakan dalam pemberian pemahaman tentang bagaimana mekanisme pemilihan dengan calon tunggal.

Muslimat Nahdlatul Ulama, Kelompok ini menjadi salah satu sasaran proses sosialisasi karena kecenderungan melakukan kesalahan cukup tinggi, karena pada golongan ini tingkatan umur mereka relative tua. Sedangkan Fatayat Nahdlatul Ulama dan Gerakan Pemuda Anshor Pada kelompok ini, tidak terlalu menjadi hal yang diprioritaskan, karena kelompok fatayat dan anshor merupakan kelompok muda, sehingga mereka dapat dengan cepat untuk memperoleh informasi.

Sasaran berikutnya ditujukan kepada Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama disingkat IPNU dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama disingkat IPPNU. Untuk kelompok IPNU dan IPPNU juga menjadi fokus sosialisasi,

karena didalam kelompok ini banyak yang menjadi pemilih pemula, sehingga target kami dapat memberikan pengertian dasar bagi pemilih pemula terkait dengan pilkada calon tunggal 2015. Diharapkan dengan diberikan pemahaman tentang pentingnya memilih pemimpin, maka para pemilih pemula ini dapat memilih sesuai dengan hati nurani masing-masing individu, sehingga dengan memberikan suara tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penentuan pemimpin blitar untuk lima tahun kedepan.

Dalam teknis penerapan yang dilakukan oleh NU terkait dengan kegiatan sosialisasi atau memberikan pendidikan politik. Kelompok fatayat dan anshor menjadi actor penting sebagai penggerak kegiatan pendidikan politik. Seperti yang sudah disampaikan diatas, bahwa banom NU seperti Muslimat dan IPNU/IPPNU, menjadi fokus kelompok sasaran yang paling diutamakan dalam pemberian pemahaman tentang bagaimana mekanisme pemilihan dengan calon tunggal.

Beberapa poin yang disampaikan dalam pendidikan politik adalah dengan menambah wawasan atau pengetahuan masyarakat tentang kepemimpinan. Seorang pemimpin harus mempunyai sikap dan tindakan yang dapat mengayomi dan mampu menjaga amanat yang telah di berikan oleh masyarakat. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberi pemahaman dasar bagi masyarakat maupun anggota Nahdlatul ulama sendiri.

Pola atau bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama, dalam mengimplementasikan program pendidikan politik tersebut melalui banom-

banomnya yang telah tersebar diseluruh Kecamatan di Kabupaten Blitar. Sosialisasi yang dilakukan oleh banom-banomnya mempunyai perbedaan dalam mekanisme penyampaianya.

Pola sosialisasi kelompok ibu-ibu Muslimat sifanya lebih santai, tidak hanya pengaruh faktor usia, tetapi pengurus juga mempunyai trik dengan menempatkan acara atau kegiatan ini, dilakukan saat ada agenda pengajian rutin tiap bulannya. Dengan pola tersebut menjadi sangat efektif karena pengurus tidak kesulitan untuk mengumpulkan masyarakat atau jama'ah.

Berbeda dengan pola atau bentuk sosialisasi ibu-ibu muslimat. Proses sosialisasi yang dilaksanakan kedalam kelompok pemilih pemula, meskipun teknisnya formal karena kegiatan ini dilaksanakan disekolah namun dalam pelaksanaannya di buat santai. Sehingga dapat memudahkan pemateri dalam mengimplementasikan agenda pelaksanaan pendidikan politik sehingga penyampainya dapat mudah terserap oleh siswa.

Selain NU, kelompok Nelayan Kabupaten Blitar yang menjadi penggerak dalam kegiatan meleak politik. Partisipasi kelompok Nelayan didalam pelaksanaan pilkada 2015, mempunyai peran atau kontribusi yang cukup besar. Tujuan utama Kelompok Nelayan adalah memberikan beberapa bekal kepada masyarakat pinggiran atau pesisir di Blitar selatan, untuk bisa memahami dan mengerti tentang tata cara memilih dan menggunakan hati juga pikiran untuk menentukan setuju tidaknya calon tunggal tersebut

memimpin lima tahun kedepan, dengan memberikan hak suaranya pilkada 2015.

Kelompok Nelayan Kabupaten Blitar mempunyai program sebagai andalanya yakni geruduk TPS. Untuk mewujudkan gerakan tersebut pertama mereka membuat agenda pendidikan politik yang tujuan utamanya adalah sebagai motivasi agar masyarakat aktif dan antusias dalam pilkada. Selain itu, program tersebut juga untuk memberikan pengertian atau pemahaman mengenai pilkada terkait dengan calon tunggal. Agenda pendidikan politik guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menyalurkan suaranya pada pilkada 2015. Dengan memilih pemimpin melalui pemberian suara setuju atau tidak setuju pada calon tunggal. Sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat pesisir yang letaknya jauh dari ibu kota, sehingga informasi sangat sedikit dapat masuk atau sangat terbatas. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Widodo:

“Dari pilkada kemaren mas, kami membuat gerakan geruduk TPS, gerakan ini kami bekerjasama dengan KPU melakukan sosialisasi dengan memberikan pengarahan tentang tata cara pemilihan dan juga untuk memberikan motivasi kepada masyarakat agar semangat dengan kemantapan hati dalam memilih bupati,, Kemudian pada saat hari H kami melakukan *Ledang* atau mengingatkan masyarakat dengan berkeliling desa”<sup>2</sup>

Untuk organisasi Kelompok Tani, masih sama dengan organisasi sebelumnya yang pada intinya mereka juga membuat kegiatan untuk

---

<sup>2</sup> Widodo, *wawancara*, Desa Serang 21 Februari 2017

menambah wawasan atau pengetahuan dasar mengenai pilkada calon tunggal kepada masyarakat. Seperti yang di kemukakan oleh Bapak Suparno:

“Semua pengurus disini mas, tidak terlalu mengetahui tentang politik di Kabupaten Blitar. Namun kami pengurus, pada tahun 2015 kemarin melakukan sosialisasi mengenai tata cara memilih kepada masyarakat dan anggota kami. Acara sosialisasi tersebut merupakan inisiatif dari kami sendiri, dalam kegiatan ini kami hadirkan pemateri langsung dari KPU Kabupaten Blitar.”<sup>3</sup>

Dari pernyataan dari masing-masing ormas diatas, menunjukkan kesamaan tujuan dan komitmen yang ingin dicapai. Memang untuk kegiatan sosialisasi kepada anggotanya, tidak semua organisasi menggunakan kadernya dalam melakukan sosialisasi. Seperti dari organisasi kelompok nelayan dan paguyuban tani, mereka mendatangkan KPU Kabupaten Blitar untuk memberikan pemahaman dasar mengenai pilkada dengan calon tunggal. Dari kelompok-kelompok tersebut sangat berharap kepada masyarakat agar dapat menggunakan hak pilihnya, meskipun pada kenyataannya respon dari masyarakat sendiri yang masih sangat rendah.

Upaya-upaya tersebut memang sangat bermanfaat di tengah stigma masyarakat terkait dengan calon tunggal, masyarakat menganggap calon tunggal tersebut yang nantinya akan menang, sehingga mereka enggan dalam memberikan suaranya. Pendidikan politik berusaha untuk memberikan

---

<sup>3</sup> parno, *wawancara*, Kantor Kelompok Tani Desa sutojayan, 24 Januari 2017

pemahaman tentang artinya memilih pemimpin yang sesuai dengan masing individu masyarakat. Dari pemilu tersebut masyarakat dapat menolak atau menyetujui dari calon tersenbut. Pandangan masyarakat terkait menangnya calon tunggal memang perlu diluruskan supaya tidak ada pemikiran yang keliru dalam pelaksanaan pilkada ini. Dengan kegiatan pendidikan politik ini akan dapat meningkatkan antusiasme masyarakat dalam pilkada meskipun dengan calon tunggal.

Hasil dari kegiatan tersebut dapat dikatakan hampir berhasil, dibuktikan dengan dapat ditekannya angka golput namun masih belum signifikan. Pendidikan politik ini dapat merubah pemikiran masyarakat yang sebelumnya memang tingkat antusiasme masyarakat sangat rendah.

## **2. Kegiatan Pembantuan**

Meskipun sama, tetapi ada sedikit hal yang membedakan dari partisipasi *civil society* tersebut adalah adanya tindakan selain mengadakan agenda pendidikan politik. Ada dua kelompok yang meberikan tenaga mapun sarana untuk meningkatkan partisipasi pmasyarakat. Kegiatan ini merupakan bentuk kerjasama kelompok-kelompok tersebut dengan KPU, guna untuk memekan angka golput yang lebih besar.

Seperti tindakan Kelompok Nelayan Kabupaten Blitar dengan antusias dan semangat dalam mengingatkan masyarakat untuk datang keTPS untuk menggunakan hak suaranya pada pilkada 2015. Kegiatan ini anggota

Kelompok Nelayan dengan melakukan *Ledang* dalam bahasa Jawa yang artinya memberikan informasi dengan berkeliling desa dengan melakukan konvoi menggunakan mobil. Untuk kegiatan ini hampir menyeluruh di desa pesisir Kabupaten Blitar. Seperti pernyataan dari supeno:

“...memberikan motivasi kepada masyarakat agar semangat dengan kemantapan hati dalam memilih bupati, Kemudian pada saat hari H kami melakukan *Ledang* atau mengingatkan masyarakat dengan berkeliling desa.”<sup>4</sup>

Paparan data diatas menunjukkan beberapa kontribusi partisipasi *civil society* pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2015. Partisipasi *civil society* menunjukkan bentuk kemandirian organisasi, melalui beberapa kegiatan yang sejatinya itu bukan wilayah *civil society*. Pelaksanaan sosialisasi maupun kegiatan yang lain merupakan bentuk untuk menunjukkan kemandirian mereka bahkan mampu membantu dengan memberika tenaga mereka.

Pada pilkada calon tunggal 2015, menurut informasi Kabupaten Blitar menjadi daerah yang diprediksi dengan tingkat kerawan terjadinya golongan putih (golput) sangat tinggi. Dari pihak KPU Kabupaten Blitar sendiri juga telah melakukan simulasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat saat pilkada. Namun kegiatan tersebut terbentur dari respon masyarakat yang sangat beragam.

---

<sup>4</sup> Widodo, *wawancara*, Desa Serang, 09 Januari 2017

Selain organisasi-organisasi yang telah disebutkan, paguyuban tani juga memberikan bantuan kepada pihak penyelenggara, terkait dengan penyediaan tempat. Paguyuban tani menyediakan tempat untuk digunakan sebagai TPS dan telah berkordinasi dengan pihak KPPS setempat. Kelompok paguyuban tani berusaha memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan pilkada tahun 2015 kemarin. Seperti pernyataan dari Suparno:

“ gini mas dalam kegiatan pilihan bupati kemaren, yang sudah kelompok tani jalankan adalah membantu menyediakan tempat pengutan suara (TPS). Kegiatan-kegiatan itu dilaksanakan setelah kami berkordinasi dengan KPPS di Desa Margomulyo Khususnya. Kami menyediakan tempat berupa gedung pertemuan milik kelompok tani”<sup>5</sup>

Kelompok Guyub Tani Makmur mempunyai peran yang berbeda, dibandingkan kelompok lain dalam partisipasinya pada pilkada serentak 2015 di Kabupaten Blitar. Mereka yang dari segi sarana sudah lengkap, secara sukarela memberikan ruangan pertemuan kelompok untuk dijadikan sebagai tempat pemungutan suara (TPS).

Dari kegiatan ini memang sudah menjadi inisiatif kelompok untuk membantu pelaksanaan pilkada. Sebelumnya memang TPS hanya didirikan sebuah tenda ataupun berada dirumah salah satu warga. Pada pilkada tahun 2015 memang bertepatan dengan musim penghujan, sehingga paguyuban tani

---

<sup>5</sup> Suparno, *wawancara*, Kantor Kelompok Tani Desa sutojayan, 24 Januari 2017

makmur memberikan salah satu ruang pertemuannya untuk digunakan sebagai tempat pemungutan suara (TPS).

Paguyuban tani makmur dalam melakukan kegiatan ini, mereka secara bersama-sama anggota atau bergotong royong untuk menyiapkan tempat yang akan digunakan TPS. Kegiatan sifatnya hanya membantu untuk menyediakan tempat. Untuk waktu persiapan yang dilakukan oleh guyub tani makmur ini adalah H-1 dari pelaksanaan pilkada 2015, kegiatan ini hampir sama dilakukan di tiap-tiap desa.

Pada pilkada calon tunggal di Kabupaten Blitar 2015, menjadi momentum bagi *civil society* untuk menunjukkan keterbukaannya, dalam membantu mensukseskan pilkada. Secara organisasi, *civil society* memang sudah terstruktur dan dapat menjangkau di seluruh lapisan masyarakat, sehingga dapat dengan mudah untuk mengupayakan masyarakat agar dapat berpartisipasi atau menggunakan hak pilihnya.

Nilai-nilai ini tercermin ketika ormas dapat memberikan kontribusi bagi negara, mereka melakukan sosialisasi dan membantu saat proses pilkada berlangsung. Salah satu partisipasi *civil society* selain sosialisasi, seperti yang sudah disampaikan diatas ketika kelompok Nelayan memberikan tenaganya dengan tujuan agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Kegiatan ini berdasarkan inisiatif sendiri dan menggunakan dana sendiri. Pemberian informasi ini dengan cara berkeiling desa untuk sekedar mengingatkan utuk menggunakan hak pilihnya.

Peran organisasi, baik kelompok dari keagamaan maupun keprofesian pada pilkada Kabupaten Blitar 2015, memiliki pengaruh yang cukup penting karena prinsip kelompok-kelompok tersebut yang akomodatif terhadap kondisi sosial budaya dan tradisi masyarakat lokal. Sehingga masyarakat dapat dengan mudah menerimanya. Proses sosialisasi pilkada yang diadakan oleh ormas, cenderung lebih efektif dan efisien, karena telah adanya struktur ormas yang masuk di pelosok desa sehingga dapat dengan mudah menjangkau seluruh masyarakat.

### **3. Penolakan Pilkada Calon Tunggal**

Dalam penyelenggaraan pilkada 2015, dengan satu pasangan calon menimbulkan beberapa masalah. Masalah tersebut adalah tidak adanya kader muda yang muncul dalam pilkada. Dari munculnya fenomena calon tunggal ini, muncul sebuah kelompok yang menamakan dirinya sebagai Forum Blitar Menggugat (FBM). FBM menyampaikan beberapa hal yang kaitannya dengan kontestasi Rjanto dengan Marhaeis Urip Widodo atau sebagai calon tunggal pada pilkada 2015. Forum Blitar Mengugat mendesak KPU untuk membatalkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak. Keputusan tersebut dipandang oleh FBM masih belum tepat, dan cenderung keikutsertaan dalam pilkada 2015 yang diadakan secara serentak terkesan dipaksakan setelah putusan MK. Tidak hanya itu keputusan tersebut tidak didasari pertimbangan situasi politik di daerah. Seperti pernyataan dari bapak zainal,

bahwa Pilkada serentak 2015 di Kabupaten Blitar terkesan dipaksakan setelah keputusan MK (Mahkamah Konstitusi). Karena bukan didasari oleh pertimbangan mengenai situasi politik di daerah.<sup>6</sup>

Pendapat tersebut diatas memang cukup berdasar apabila melihat dinamika politik yang terjadi selama proses pencalonan yang terjadi. Terbukti dengan adanya Koalisi Rakyat Berjuang yang sempat muncul setelah adanya putusan MK no 100 yang telah memenangkan gugatan calon tunggal. Sebenarnya peluang dalam pengajuan menjadi calon bupati sangat terbuka, terlebih ada 37 kursi di DPRD Kab, Blitar yang tidak digunakan. Aksi dari forum blitar menggugat juga tidak hanya sampai di KPU Kabupaten Blitar saja, tetapi mereka juga menuntut DPRD Kabupaten Blitar untuk membuat petisi untuk menolak pilkada yang diselenggarakan serentak.

Faktanya sebagian besar partai politik yang sesungguhnya merupakan representasi dari rakyat saja tidak setuju apabila pilkada dilangsungkan dengan calon tunggal.<sup>7</sup> Mereka menyayangkan sikap dari kader partai yang sebelumnya sudah mantap untuk maju namun pada akhirnya menarik diri dalam pencalonan bupati, dengan alasan tidak ada titik temu dalam koalisi. FBM berharap bahwa di kabupaten Blitar tercipta persaingan yang lebih

---

<sup>6</sup> Pulung Aji, *Forum Blitar Menggugat Pilkada Kabupaten*, <http://PojokPitu.com>(diakses pada rabu, 21 Juni 2017 Pukul 17:35)

<sup>7</sup> Hari Tri Wasono, *Massa di Blitar Meminta Desain khusus Surat Suara Pilkada*, <http://Tempo.com> (diakses pada jum'at, 23 Juni 2017 Pukul 10:13)

kompetitif. Sehingga masyarakat mendapat alternative pilihan pada pemilihan bupati

Menurut FBM Pilkada calon tunggal 2015, dikhawatirkan dalam pelaksanaannya akan berpotensi terjadi keributan karena banyak masyarakat yang menolak. Bahkan dapat memicu keengganan masyarakat untuk datang ke TPS untuk memberikan suaranya. Kelompok ini juga menyampaikan beberapa point terkait dengan format pembuatan surat dengan menambahkan opsi tidak setuju pilkada, opsi ini mereka pandang dapat mengakomodir dari masyarakat yang tidak setuju dengan pencalonan Rijanto dan Marhaeinis Urip Widodo.

#### **B. Pro dan Kontra dalam Partisipasi *Civil Society* pada Pilkada Calon Tunggal**

Partisipasi politik pada dasarnya di bagi menjadi beberapa tipologi seperti, partisipasi aktif, partisipasi pasif tertekan (apatid), partisipasi militan radikal, dan partisipasi pasif. Tipologi dapat diketahui melalui beberapa bentuk kegiatan yang dilakukan oleh beberapa *civil society* pada pelaksanaan pemilihan bupati 2015. Dengan berbagai macam kegiatan baik kelompok yang pro dan kelompok yang kontra.

Dalam kontstasi calon tunggal dalam pilkada tahun 2015, ada pandangan yang cukup jelas dari beberapa kelompok masyarakat. Perbedaan pandangan tersebut terletak pada mekanisme penyelenggaraan pilkada. Menurut pihak yang pro pilkada, salah satu informan yang berasal dari tokoh NU. Beliau menjelaskan bahwa sebagai



pendidikan politik. Sedangkan yang kontra dengan dengan pilkada calon tunggal melihat keputusan yang di sahkan MK tidak didasari dengan kondisi politik yang ada di daerah.

Hal tersebut sesuai dengan model konsep partisipasi politik, ada dua tipologi yang sangat kuat dalam penyelenggaraan pilkada ini. Tipologi tersebut bermuara pada dua poros yang menjadi penentu dalam penyelenggaraan pilkada, yakni kelompok pro pilkada yang masuk kedalam partisipasi aktif, dan juga kelompok kontra yang termasuk dalam tipologi partisipasi militan radikal.

Partisipasi politik aktif pada dasarnya ketika masyarakat memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi. Dapat dilihat melalui beberapa kegiatan yang telah dilakukan, sebagai langkah untuk mensukseskan pilkada 2015. Dengan keadaan masyarakat yang pesimis dengan kontestasi dari calon bupati karena hanya ada satu calon menjadi tantangan tersendiri. Mereka aktif untuk menyuarakan agar masyarakat mau ikut berpartisipasi dengan memberikan suaranya. *Civil society* yang sebelumnya hanya sebagai kelompok independen dan tidak ikut campur dalam urusan politik. Kemudian berubah menjadi kekuatan yang mampu memberikan dampak positif dalam kegiatan berdemokrasi. *Civil society* yang aktif dalam kegiatan ini tidak meninggalkan jati dirinya sebagai ormas maupun LSM, mereka hanya berupaya untuk memberikan pendidikan politik baru sebagai bentuk pembangunan dalam lingkup berdemokrasi.

Sedangkan partisipasi politik kelompok kontra yang termasuk kedalam partisipasi militan radikal. Meskipun tidak sepenuhnya masuk dalam kategori ini

karena tidak ada bagian seperti kegiatan yang illegal seperti penggulingan pemerintahan, namun ada beberapa kriteria yang dapat dikaitkan dengan jenis ini. Partisipasi militan radikal merupakan bentuk kesadaran masyarakat akan politik yang tinggi, tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah. Seperti pada pihak kontra, mereka secara aktif dalam menyuarakan penolakannya pada pilkada yang akan diselenggarakan dengan hanya satu pasangan calon. Pihak kontra ini juga sudah membuat sebuah tindakan dengan mendorong DPRD Kabupaten Blitar untuk membuat sebuah petisi dan meminta anggota dewan untuk menandatangani. Tidak hanya sampai disitu mereka juga melakukan aksi dengan menyampaikan aspirasinya melalui aksi demonstrasi. Bentuk-bentuk kegiatan tersebut sebagai partisipasi politik yang dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, kepuasan atau ketidakpuasan warga negara.

Memang pilkada calon tunggal merupakan fenomena politik baru, sehingga dapat berpengaruh pada setiap lapisan masyarakat. Partisipasi *civil society* pada pilkada calon tunggal, memang menjadi pertama kalinya terjadi pada pilkada di Kabupaten Blitar. Partisipasi *civil society* di Kabupaten Blitar di satu sisi mempunyai satu kesamaan, yakni pengadaan kegiatan pendidikan politik bagi masyarakat, sehingga akan mampu meningkatkan partisipasinya dalam pilkada 2015. Pendidikan politik dapat dikatakan sebagai hal yang sangat penting terkait dengan rendahnya respon masyarakat dalam pilkada calon tunggal. Selain pendidikan politik, ada juga tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat seperti telah disebutkan

pada subbab sebelumnya. Dengan sukarela memberikan tenaga mereka agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.

Disisi lain kelompok yang kontra memberikan tekanan berupa tuntutan agar dibatalkannya pilkada dengan calon tunggal. Kelompok ini menamakan dirinya sebagai Forum Blitar Menggugat (FBM), dan menjadi satu-satunya yang secara tegas menolak calon tunggal, karena dianggap terjadi penurunan demokrasi yang ada Blitar. Forum Blitar Menggugat sebagai pihak yang tidak menyetujui pilkada 2015 merupakan sebuah kritik terhadap kaderisasi pemiimpin di Kabupaten Blitar. Mereka juga telah melakukan aksi di Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai pihak penyelenggara pemilu. Menurut pihak dari KPU Kabupaten Blitar, mereka menyerahkan urusan mengenai mekanisme dalam penyelenggaraan pilkada 2015 kepada KPU Pusat, dan menyatakan mereka hanya pihak yang menjalankan instruksi dari pusat.

Apabila dilihat dari tindakan, baik pihak yang pro maupun pihak kontra mereka sama-sama mempunyai dampak yang positif bagi pilkada setelahnya. Karena apabila sama-sama diambil dari segi positifnya, dari kelompok yang pro pilkada calon tunggal mereka berusaha menyadarkan mayoritas masyarakat, yang enggan menggunakan hak pilihnya, agar mereka menjadi lebih bersemangat dan aktif dalam pelaksanaan *even* lima tahunan ini. Untuk dari pihak yang kontra juga memberikan dampak positif. Dampak ini dapat dilihat bagaimana tuntutan yang mereka sampaikan. Tuntutan tersebut merupakan representasi dari keinginan masyarakat yang tidak menginginkan adanya calon tunggal. Tindakan forum blitar menggugat

merupakan sebuah kritik tentang menurunnya perkembangan demokrasi ditingkat lokal, dibuktikan dengan tidak adanya kader muda potensial yang mampu dan mau bertarung dalam momentum pilkada.

Dari beberapa pernyataan di atas, membuktikan bahwa partisipasi *civil society* dalam pilkada 2015, menunjukkan usaha untuk pemberdayaan demokrasi masyarakat madani demi terwujudnya konsep *civil society* dan juga dapat berkontribusi dalam pilkada. Dalam pelaksanaan program maupun tindakan dan rencana, yang telah disiapkan untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat, akan pentingnya menentukan pemimpin untuk lima tahun kedepan. Program tersebut muncul ketika antusiasme masyarakat tentang pilkada calon tunggal sangat rendah sehingga pilar penegak *civil society* secara organisasi kelembagaan mampu dan dapat dengan mudah mengimplementasikan kepada masyarakat. Karena dimudahkan oleh struktur kelembagaan yang sudah terdapat di Kecamatan hingga tingkatan terkecil yakni Dusun.

Peran *civil society* memang cukup beragam, namun pada intinya kontribusinya dalam pilkada adalah untuk mensukseskan pilkada Kabupaten Blitar 2015. Disisi lain *civil society* berusaha untuk memperkuat posisi masyarakat bila berhadapan dengan kepentingan negara dan berasaskan nilai-nilai seperti, Kesukarelaan (*voluntary*), Keswasembadaan (*self generating*), Keswadayaan (*self supporting*), Kemandirian tinggi yang berhadapan dengan Negara dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang di ikuti oleh warganya.

Dalam konteks pilkada, sebagai bentuk demokrasi lokal. *Civil society* mampu tampil sebagai pembeda pada pilkada 2015, baik ormas keagamaan, dan ormas keprofesian, mampu berperan dalam mengimplementasikan nilai-nilai yang mereka jadikan pedoman, berupa nilai kemandirian dan keswasembadaan. Partisipasi *Civil society* di Kabupaten Blitar pada penyelenggaraan pemilu 2015 memberikan warna yang berbeda, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya memang tidak ada kegiatan dari organisasi manapun yang secara sukarela dengan sangat antusias dari masing-masing ormas, dengan program-program yang telah dilaksanakan atau dibuat. Partisipasi *civil society* pada intinya dapat memberikan kontribusi untuk peningkatan partisipasi masyarakat melalui pendidikan politik dan juga program-program yang lain. Dengan program-program yang telah dijalankan, ini menunjukkan kekuatan *civil society*, dihadapan negara karena dalam pelaksanaa pilkada 2015, tidak dapat berjalan apabila tanpa campur tangan *civil society* dalam memberikan pemahaman-pemahaman dasar tentang pencalonan calon tunggal.

Dalam konteks inilah *civil society* yang mengandaikan terbentuknya masyarakat kritis dan mandiri. Dengan mengembangkan *civil society*, maka diharapkan kelak masyarakat tidak menggantungkan nasibnya pada Negara. Namun meski begitu, penghadapan rakyat dengan Negara secara langsung tetap merupakan keinginan yang melampaui batas. Selain memicu antagonisme, penghadapan inipun akan menyulitkan pengorganisasian masyarakat yang pada titik tertentu dibutuhkan untuk menggalang kebersamaan dalam rangka menggerakkan roda pembangunan

